



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4082);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);





22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah brbrrrapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG  
dan  
BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp 1.840.617.425.977,00	
2. Belanja Daerah	<u>Rp 1.890.617.425.977,00</u>	
Defisit		Rp (50.000.000.000,00)
3. Pembiayaan Daerah:		
a. Penerimaan	Rp 85.000.000.000,00	
b. Pengeluaran	<u>Rp 35.000.000.000,00</u>	
Pembiayaan Netto		<u>Rp 50.000.000.000,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp	0 ,00



## Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
  - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 246.398.162.977,00
  - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp 1.142.714.564.000,00
  - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp 451.504.699.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
  - a. Pajak Daerah sejumlah Rp 79.975.000.000,00
  - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp 18.566.493.700,00
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp 11.153.980.293,00
  - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp 136.702.688.984,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
  - a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp 40.829.780.000,00
  - b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp 835.669.833.000,00
  - c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp 266.214.951.000,00
- (4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
  - a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp 107.921.326.000,00
  - b. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp 0,00
  - c. Pendapatan Dana Desa sejumlah Rp 195.614.218.000,00
  - d. Pendapatan Dana BOS Rp 69.433.400.000,00
  - e. Dana Insentif Daerah Rp 78.535.755.000,00

## Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
  - a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 1.163.443.380.647,00
  - b. Belanja Langsung sejumlah Rp 727.174.045.330,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
  - a. Belanja Pegawai sejumlah Rp 738.872.970.501,00
  - b. Belanja Hibah sejumlah Rp 71.400.315.000,00
  - c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp 30.019.350.000,00
  - d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa sejumlah Rp 9.262.497.853,00
  - d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa sejumlah Rp 311.888.247.293,00
  - e. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp 2.000.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
  - a. Belanja Pegawai sejumlah Rp 83.202.928.520,00
  - b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp 434.103.309.086,00
  - c. Belanja Modal sejumlah Rp 209.867.807.724,00



#### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
- |                         |    |                   |
|-------------------------|----|-------------------|
| a. Penerimaan sejumlah  | Rp | 85.000.000.000,00 |
| b. Pengeluaran sejumlah | Rp | 35.000.000.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan:
- |   |    |                   |
|---|----|-------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sejumlah | Rp | 55.000.000.000,00 |
| b. Penerimaan Pinjaman Daerah   | Rp | 30.000.000.000,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan:
- |  |    |                   |
|--|----|-------------------|
| a. Penyertaan modal (investasi) pemerintahan daerah sejumlah | Rp | 5.000.000.000,00  |
| b. Pembayaran pokok utang                                    | Rp | 30.000.000.000,00 |

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- i. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;
- k. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini;
- l. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah;
- m. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.





## Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan belanja/pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- (3) Belanja/pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (5) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (6) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
  - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (7) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (8) Ketentuan mengenai pelaksanaan belanja/pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 8

- (1) Pekerjaan dari suatu kontrak yang sumber dananya telah dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah harus diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, dapat dilanjutkan pekerjaannya pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pekerjaan yang dapat dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk Pekerjaan Konstruksi maksimal sisa pekerjaan 20% (dua puluh per seratus) dan akan selesai paling lambat 50 (lima puluh) hari sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan yang tertuang dalam perjanjian.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan sisa pekerjaan tahun anggaran berkenaan yang dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya diatur dalam Peraturan Bupati.



Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2019 NOMOR 14  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA TENGAH:  
(14-418 / 2019 )

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650803 199210 1 001





**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**RINGKASAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	<b>PENDAPATAN</b>	1.840.617.425.977,00
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	246.398.162.977,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	79.975.000.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	18.566.493.700,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.153.980.293,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	136.702.688.984,00
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	1.142.714.564.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	40.829.780.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	835.669.833.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	266.214.951.000,00
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	451.504.699.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	107.921.326.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00
1.3.6	Dana Desa	195.614.218.000,00
1.3.7	Dana BOS	69.433.400.000,00
1.3.9	Dana Insentif Daerah (DID)	78.535.755.000,00
2	<b>BELANJA</b>	1.890.617.425.977,00
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.163.336.380.647,00
2.1.1	Belanja Pegawai	738.785.970.501,00
2.1.4	Belanja Hibah	71.380.315.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	30.019.350.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	9.262.497.853,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	311.888.247.293,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	727.281.045.330,00
2.2.1	Belanja Pegawai	83.314.928.520,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	434.123.309.086,00
2.2.3	Belanja Modal	209.842.807.724,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(50.000.000.000,00)
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	85.000.000.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	55.000.000.000,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	30.000.000.000,00
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	35.000.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	30.000.000.000,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	50.000.000.000,00
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00

BATANG, 27 Desember 2019

**BUPATI BATANG,**

ttd

**WIHAJI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
1	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>	127.254.308.984,00	560.409.048.369,00	511.373.771.872,00	1.071.782.820.241,00
1.01	<b>Pendidikan</b>	0,00	437.904.712.961,00	152.322.092.456,00	590.226.805.417,00
1.01 . 1.01.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0,00	437.904.712.961,00	152.322.092.456,00	590.226.805.417,00
1.02	<b>Kesehatan</b>	126.661.308.984,00	98.145.619.653,00	227.384.015.346,00	325.529.634.999,00
1.02 . 1.02.01	DINAS KESEHATAN	36.661.308.984,00	65.272.988.036,00	114.841.766.315,00	180.114.754.351,00
1.02 . 1.02.02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG	81.000.000.000,00	27.018.090.578,00	92.425.142.831,00	119.443.233.409,00
1.02 . 1.02.03	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG	9.000.000.000,00	5.854.541.039,00	20.117.106.200,00	25.971.647.239,00
1.03	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	593.000.000,00	11.547.015.216,00	95.639.100.502,00	107.186.115.718,00
1.03 . 1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	593.000.000,00	11.547.015.216,00	93.985.198.217,00	105.532.213.433,00
1.03 . 4.01.11	KECAMATAN BATANG	0,00	0,00	1.653.902.285,00	1.653.902.285,00
1.04	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>	0,00	2.680.108.439,00	23.577.387.915,00	26.257.496.354,00
1.04 . 1.04.01	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	2.680.108.439,00	18.324.516.600,00	21.004.625.039,00
1.04 . 4.01.11	KECAMATAN BATANG	0,00	0,00	5.252.871.315,00	5.252.871.315,00
1.05	<b>Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>	0,00	7.836.951.627,00	5.822.822.006,00	13.659.773.633,00
1.05 . 1.05.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	4.619.069.050,00	1.573.164.418,00	6.192.233.468,00
1.05 . 1.05.02	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	2.073.387.758,00	2.807.525.721,00	4.880.913.479,00
1.05 . 1.05.03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	1.144.494.819,00	1.256.031.867,00	2.400.526.686,00
1.05 . 4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	186.100.000,00	186.100.000,00
1.06	<b>Sosial</b>	0,00	2.294.640.473,00	6.628.353.647,00	8.922.994.120,00
1.06 . 1.05.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	0,00	2.086.339.900,00	2.086.339.900,00
1.06 . 1.05.03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
1.06 . 1.06.01	DINAS SOSIAL	0,00	2.294.640.473,00	2.239.052.301,00	4.533.692.774,00
1.06 . 4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	2.102.961.446,00	2.102.961.446,00
2	<b>Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar</b>	5.227.532.200,00	39.742.791.405,00	82.410.050.674,00	122.152.842.079,00
2.01	<b>Tenaga Kerja</b>	0,00	2.057.183.555,00	2.644.119.012,00	4.701.302.567,00
2.01 . 2.01.01	DINAS KETENAGAKERJAAN	0,00	2.057.183.555,00	2.644.119.012,00	4.701.302.567,00
2.02	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak</b>	0,00	3.095.872.216,00	1.340.842.100,00	4.436.714.316,00



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
2.02 . 2.02.01	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	3.095.872.216,00	1.340.842.100,00	4.436.714.316,00
2.03	<b>Pangan</b>	375.000.000,00	9.452.289.072,00	4.987.711.000,00	14.440.000.072,00
2.03 . 2.03.01	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	375.000.000,00	9.452.289.072,00	4.987.711.000,00	14.440.000.072,00
2.04	<b>Pertanahan</b>	0,00	0,00	149.636.000,00	149.636.000,00
2.04 . 4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	149.636.000,00	149.636.000,00
2.05	<b>Lingkungan Hidup</b>	200.000.000,00	5.222.800.641,00	7.911.758.039,00	13.134.558.680,00
2.05 . 2.05.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	200.000.000,00	5.222.800.641,00	7.878.911.339,00	13.101.711.980,00
2.05 . 4.01.11	KECAMATAN BATANG	0,00	0,00	32.846.700,00	32.846.700,00
2.06	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	0,00	3.541.881.795,00	3.718.264.774,00	7.260.146.569,00
2.06 . 2.06.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	3.541.881.795,00	3.718.264.774,00	7.260.146.569,00
2.07	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>	0,00	2.933.054.721,00	6.011.494.800,00	8.944.549.521,00
2.07 . 2.07.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	2.933.054.721,00	2.335.638.300,00	5.268.693.021,00
2.07 . 4.01.11	KECAMATAN BATANG	0,00	0,00	3.645.856.500,00	3.645.856.500,00
2.07 . 4.01.19	KECAMATAN TERSONO	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2.08	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	0,00	0,00	7.279.586.312,00	7.279.586.312,00
2.08 . 2.02.01	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	0,00	7.279.586.312,00	7.279.586.312,00
2.09	<b>Perhubungan</b>	2.486.532.200,00	4.555.866.976,00	25.448.074.590,00	30.003.941.566,00
2.09 . 2.09.01	DINAS PERHUBUNGAN	2.486.532.200,00	4.555.866.976,00	25.448.074.590,00	30.003.941.566,00
2.10	<b>Komunikasi dan Informatika</b>	0,00	3.055.603.457,00	7.666.547.171,00	10.722.150.628,00
2.10 . 2.10.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	3.055.603.457,00	6.094.197.171,00	9.149.800.628,00
2.10 . 4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	1.572.350.000,00	1.572.350.000,00
2.11	<b>Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah</b>	0,00	0,00	540.000.000,00	540.000.000,00
2.11 . 3.06.01	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	0,00	0,00	540.000.000,00	540.000.000,00
2.12	<b>Penanaman Modal</b>	2.166.000.000,00	2.739.411.953,00	4.253.986.634,00	6.993.398.587,00
2.12 . 2.12.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.166.000.000,00	2.739.411.953,00	4.103.986.634,00	6.843.398.587,00
2.12 . 4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00
2.13	<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>	0,00	0,00	3.460.750.000,00	3.460.750.000,00
2.13 . 3.02.01	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	0,00	0,00	3.460.750.000,00	3.460.750.000,00
2.14	<b>Statistik</b>	0,00	0,00	200.400.000,00	200.400.000,00
2.14 . 2.10.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	0,00	200.400.000,00	200.400.000,00
2.16	<b>Kebudayaan</b>	0,00	0,00	2.410.450.000,00	2.410.450.000,00
2.16 . 1.01.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0,00	0,00	2.400.450.000,00	2.400.450.000,00





KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
2.16 . 2.07.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.17	<b>Perpustakaan</b>	0,00	3.088.827.019,00	3.924.730.242,00	7.013.557.261,00
2.17 . 2.17.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0,00	3.088.827.019,00	3.924.730.242,00	7.013.557.261,00
2.18	<b>Kearsipan</b>	0,00	0,00	461.700.000,00	461.700.000,00
2.18 . 2.17.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0,00	0,00	461.700.000,00	461.700.000,00
3	<b>Urusan Pilihan</b>	11.689.841.500,00	16.150.359.545,00	30.869.241.143,00	47.019.600.688,00
3.01	<b>Kelautan dan Perikanan</b>	5.375.250.000,00	4.766.839.271,00	4.150.782.000,00	8.917.621.271,00
3.01 . 3.01.01	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN PETERNAKAN	5.375.250.000,00	4.766.839.271,00	4.150.782.000,00	8.917.621.271,00
3.02	<b>Pariwisata</b>	3.000.000.000,00	3.419.136.395,00	7.473.702.270,00	10.892.838.665,00
3.02 . 3.02.01	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	3.000.000.000,00	3.419.136.395,00	7.473.702.270,00	10.892.838.665,00
3.03	<b>Pertanian</b>	0,00	0,00	8.072.200.350,00	8.072.200.350,00
3.03 . 2.03.01	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	0,00	5.027.200.350,00	5.027.200.350,00
3.03 . 3.01.01	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN PETERNAKAN	0,00	0,00	3.045.000.000,00	3.045.000.000,00
3.04	<b>Kehutanan</b>	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00
3.04 . 2.05.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00
3.06	<b>Perdagangan</b>	3.314.591.500,00	7.964.383.879,00	8.459.231.800,00	16.423.615.679,00
3.06 . 3.06.01	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	3.314.591.500,00	7.964.383.879,00	8.459.231.800,00	16.423.615.679,00
3.07	<b>Perindustrian</b>	0,00	0,00	2.568.324.723,00	2.568.324.723,00
3.07 . 3.06.01	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	0,00	0,00	2.568.324.723,00	2.568.324.723,00
3.08	<b>Transmigrasi</b>	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00
3.08 . 2.01.01	DINAS KETENAGAKERJAAN	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00
4	<b>Urusan Penunjang / Pemerintahan</b>	1.696.445.743.293,00	547.034.181.328,00	102.627.981.641,00	649.662.162.969,00
4.01	<b>Administrasi Pemerintahan</b>	11.150.380.293,00	68.286.606.891,00	49.921.024.604,00	118.207.631.495,00
4.01 . 4.01.01	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	0,00	22.127.214.000,00	0,00	22.127.214.000,00
4.01 . 4.01.02	BUPATI dan WAKIL BUPATI	0,00	773.432.590,00	0,00	773.432.590,00
4.01 . 4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	11.150.380.293,00	11.669.440.747,00	15.899.732.225,00	27.569.172.972,00
4.01 . 4.01.04	SEKRETARIAT DPRD	0,00	3.333.018.363,00	25.832.583.787,00	29.165.602.150,00
4.01 . 4.01.11	KECAMATAN BATANG	0,00	8.251.259.990,00	1.690.478.978,00	9.941.738.968,00
4.01 . 4.01.12	KECAMATAN TULIS	0,00	1.777.472.940,00	318.750.000,00	2.096.222.940,00
4.01 . 4.01.13	KECAMATAN WARUNGASEM	0,00	1.447.356.903,00	522.500.000,00	1.969.856.903,00
4.01 . 4.01.14	KECAMATAN WONOTUNGGAL	0,00	1.509.133.468,00	341.250.000,00	1.850.383.468,00
4.01 . 4.01.15	KECAMATAN BANDAR	0,00	1.906.357.684,00	1.074.973.960,00	2.981.331.644,00
4.01 . 4.01.16	KECAMATAN BLADO	0,00	1.695.082.986,00	341.250.000,00	2.036.332.986,00
4.01 . 4.01.17	KECAMATAN REBAN	0,00	1.612.472.641,00	363.750.000,00	1.976.222.641,00



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
4.01 . 4.01.18	KECAMATAN KANDEMAN	0,00	1.603.252.583,00	303.679.100,00	1.906.931.683,00
4.01 . 4.01.19	KECAMATAN TERSONO	0,00	1.580.385.692,00	703.250.000,00	2.283.635.692,00
4.01 . 4.01.20	KECAMATAN GRINGSING	0,00	1.525.735.981,00	348.748.030,00	1.874.484.011,00
4.01 . 4.01.21	KECAMATAN SUBAH	0,00	1.553.955.758,00	849.438.000,00	2.403.393.758,00
4.01 . 4.01.22	KECAMATAN LIMPUNG	0,00	1.445.153.046,00	337.253.900,00	1.782.406.946,00
4.01 . 4.01.23	KECAMATAN BANYUPUTIH	0,00	1.446.237.223,00	315.000.000,00	1.761.237.223,00
4.01 . 4.01.24	KECAMATAN PECALUNGAN	0,00	1.409.356.718,00	311.100.000,00	1.720.456.718,00
4.01 . 4.01.25	KECAMATAN BAWANG	0,00	1.620.287.578,00	367.286.624,00	1.987.574.202,00
4.02	<b>Pengawasan</b>	0,00	5.296.399.650,00	4.654.695.496,00	9.951.095.146,00
4.02 . 4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	81.383.000,00	81.383.000,00
4.02 . 4.02.01	INSPEKTORAT DAERAH	0,00	5.296.399.650,00	4.573.312.496,00	9.869.712.146,00
4.03	<b>Perencanaan</b>	0,00	3.590.452.451,00	4.489.176.500,00	8.079.628.951,00
4.03 . 4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	657.000.000,00	657.000.000,00
4.03 . 4.01.19	KECAMATAN TERSONO	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
4.03 . 4.03.01	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0,00	3.590.452.451,00	3.812.176.500,00	7.402.628.951,00
4.04	<b>Keuangan</b>	1.685.295.363.000,00	466.304.766.451,00	35.292.392.191,00	501.597.158.642,00
4.04 . 4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	190.000.000,00	190.000.000,00
4.04 . 4.04.01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	91.076.100.000,00	41.754.356.305,00	35.102.392.191,00	76.856.748.496,00
4.04 . 4.04.02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH (PPKD)	1.594.219.263.000,00	424.550.410.146,00	0,00	424.550.410.146,00
4.05	<b>Kepegawaian</b>	0,00	3.555.955.885,00	7.750.692.850,00	11.306.648.735,00
4.05 . 4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00
4.05 . 4.05.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	0,00	3.555.955.885,00	7.610.692.850,00	11.166.648.735,00
4.07	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>	0,00	0,00	520.000.000,00	520.000.000,00
4.07 . 4.03.01	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0,00	0,00	520.000.000,00	520.000.000,00
<b>JUMLAH</b>		1.840.617.425.977,00	1.163.336.380.647,00	727.281.045.330,00	1.890.617.425.977,00
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		(50.000.000.000,00)			



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PEMBIAYAAN			SILPA TAB
		PENERIMAAN	PENGELUARAN	PEMBIAYAAN NETTO	
1	2	3	4	5	6
1	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>	42.841.384.337,00	30.000.000.000,00	12.841.384.337,00	
1.02	<b>Kesehatan</b>	42.841.384.337,00	30.000.000.000,00	12.841.384.337,00	
1.02 . 1.02.01	DINAS KESEHATAN	12.841.384.337,00	0,00	12.841.384.337,00	
1.02 . 1.02.02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00	
4	<b>Urusan Penunjang / Pemerintahan</b>	42.158.615.663,00	5.000.000.000,00	37.158.615.663,00	
4.01	<b>Administrasi Pemerintahan</b>	0,00	5.000.000.000,00	(5.000.000.000,00)	
4.01 . 4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	5.000.000.000,00	(5.000.000.000,00)	
4.04	<b>Keuangan</b>	42.158.615.663,00	0,00	42.158.615.663,00	
4.04 . 4.04.02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH (PPKD)	42.158.615.663,00	0,00	42.158.615.663,00	

**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN**

0,00

BATANG, 27 Desember

ttd

**WIHAJI**







**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN**  
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
1.01.01	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>	0,00	437.904.712.961,00	154.722.542.456,00	592.627.255.417,00
1.01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	0,00	437.904.712.961,00	152.322.092.456,00	590.226.805.417,00
2.16	Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar Kebudayaan	0,00	0,00	2.400.450.000,00	2.400.450.000,00
1.02.01	<b>DINAS KESEHATAN</b>	36.661.308.984,00	65.272.988.036,00	114.841.766.315,00	180.114.754.351,00
1.02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	36.661.308.984,00	65.272.988.036,00	114.841.766.315,00	180.114.754.351,00
1.02.02	<b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG</b>	81.000.000.000,00	27.018.090.578,00	92.425.142.831,00	119.443.233.409,00
1.02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	81.000.000.000,00	27.018.090.578,00	92.425.142.831,00	119.443.233.409,00
1.02.03	<b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG</b>	9.000.000.000,00	5.854.541.039,00	20.117.106.200,00	25.971.647.239,00
1.02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	9.000.000.000,00	5.854.541.039,00	20.117.106.200,00	25.971.647.239,00
1.03.01	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	593.000.000,00	11.547.015.216,00	93.985.198.217,00	105.532.213.433,00
1.03	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	593.000.000,00	11.547.015.216,00	93.985.198.217,00	105.532.213.433,00
1.04.01	<b>DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	0,00	2.680.108.439,00	18.324.516.600,00	21.004.625.039,00
1.04	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	2.680.108.439,00	18.324.516.600,00	21.004.625.039,00
1.05.01	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	0,00	4.619.069.050,00	3.659.504.318,00	8.278.573.368,00
1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	4.619.069.050,00	1.573.164.418,00	6.192.233.468,00
1.06	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	0,00	0,00	2.086.339.900,00	2.086.339.900,00
1.05.02	<b>KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	0,00	2.073.387.758,00	2.807.525.721,00	4.880.913.479,00
1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	2.073.387.758,00	2.807.525.721,00	4.880.913.479,00
1.05.03	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>	0,00	1.144.494.819,00	1.456.031.867,00	2.600.526.686,00
1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	1.144.494.819,00	1.256.031.867,00	2.400.526.686,00
1.06	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
1.06.01	<b>DINAS SOSIAL</b>	0,00	2.294.640.473,00	2.239.052.301,00	4.533.692.774,00



KODE	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
2.01.01	1.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial <b>DINAS KETENAGAKERJAAN</b>	0,00	2.294.640.473,00	2.239.052.301,00	4.533.692.774,00
		0,00	2.057.183.555,00	2.714.119.012,00	4.771.302.567,00
	2.01 Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar Tenaga Kerja	0,00	2.057.183.555,00	2.644.119.012,00	4.701.302.567,00
	3.08 Urusan Pilihan Transmigrasi	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00
2.02.01	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	0,00	3.095.872.216,00	8.620.428.412,00	11.716.300.628,00
	2.02 Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	0,00	3.095.872.216,00	1.340.842.100,00	4.436.714.316,00
	2.08 Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	7.279.586.312,00	7.279.586.312,00
2.03.01	<b>DINAS PANGAN DAN PERTANIAN</b>	375.000.000,00	9.452.289.072,00	10.014.911.350,00	19.467.200.422,00
	2.03 Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar Pangan	375.000.000,00	9.452.289.072,00	4.987.711.000,00	14.440.000.072,00
	3.03 Urusan Pilihan Pertanian	0,00	0,00	5.027.200.350,00	5.027.200.350,00
2.05.01	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>	200.000.000,00	5.222.800.641,00	7.953.911.339,00	13.176.711.980,00
	2.05 Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	200.000.000,00	5.222.800.641,00	7.878.911.339,00	13.101.711.980,00
	3.04 Urusan Pilihan Kehutanan	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00
2.06.01	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	0,00	3.541.881.795,00	3.718.264.774,00	7.260.146.569,00
	2.06 Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	3.541.881.795,00	3.718.264.774,00	7.260.146.569,00
2.07.01	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	0,00	2.933.054.721,00	2.345.638.300,00	5.278.693.021,00
	2.07 Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	2.933.054.721,00	2.335.638.300,00	5.268.693.021,00
	2.16 Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar Kebudayaan	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.09.01	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>	2.486.532.200,00	4.555.866.976,00	25.448.074.590,00	30.003.941.566,00
	2.09 Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar Perhubungan	2.486.532.200,00	4.555.866.976,00	25.448.074.590,00	30.003.941.566,00
2.10.01	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	0,00	3.055.603.457,00	6.294.597.171,00	9.350.200.628,00
	2.10 Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika	0,00	3.055.603.457,00	6.094.197.171,00	9.149.800.628,00
	2.14 Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar Statistik	0,00	0,00	200.400.000,00	200.400.000,00
2.12.01	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>	2.166.000.000,00	2.739.411.953,00	4.103.986.634,00	6.843.398.587,00
	2.12 Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar Penanaman Modal	2.166.000.000,00	2.739.411.953,00	4.103.986.634,00	6.843.398.587,00
2.17.01	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>	0,00	3.088.827.019,00	4.386.430.242,00	7.475.257.261,00
	2.17 Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar Perpustakaan	0,00	3.088.827.019,00	3.924.730.242,00	7.013.557.261,00
	2.18 Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar Kearsipan	0,00	0,00	461.700.000,00	461.700.000,00
3.01.01	<b>DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN PETERNAKAN</b>	5.375.250.000,00	4.766.839.271,00	7.195.782.000,00	11.962.621.271,00
	3.01 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	5.375.250.000,00	4.766.839.271,00	4.150.782.000,00	8.917.621.271,00



KODE	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
3.02.01	3.03 <b>DINAS PARIWISATA, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>	0,00	0,00	3.045.000.000,00	3.045.000.000,00
	2.13 Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga	3.000.000.000,00	3.419.136.395,00	10.934.452.270,00	14.353.588.665,00
	3.02 Urusan Pilihan Pariwisata	0,00	0,00	3.460.750.000,00	3.460.750.000,00
3.06.01	<b>DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM</b>	3.000.000.000,00	3.419.136.395,00	7.473.702.270,00	10.892.838.665,00
	2.11 Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	3.314.591.500,00	7.964.383.879,00	11.567.556.523,00	19.531.940.402,00
	3.06 Urusan Pilihan Perdagangan	0,00	0,00	540.000.000,00	540.000.000,00
	3.07 Urusan Pilihan Perindustrian	3.314.591.500,00	7.964.383.879,00	8.459.231.800,00	16.423.615.679,00
4.01.01	<b>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>	0,00	0,00	2.568.324.723,00	2.568.324.723,00
	4.01 Urusan Penunjang / Pemerintahan Administrasi Pemerintahan	0,00	22.127.214.000,00	0,00	22.127.214.000,00
4.01.02	<b>BUPATI dan WAKIL BUPATI</b>	0,00	22.127.214.000,00	0,00	22.127.214.000,00
	4.01 Urusan Penunjang / Pemerintahan Administrasi Pemerintahan	0,00	773.432.590,00	0,00	773.432.590,00
4.01.03	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	0,00	773.432.590,00	0,00	773.432.590,00
	1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	11.150.380.293,00	11.669.440.747,00	21.129.162.671,00	32.798.603.418,00
	1.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	0,00	0,00	186.100.000,00	186.100.000,00
	2.04 Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar Pertanahan	0,00	0,00	2.102.961.446,00	2.102.961.446,00
	2.10 Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	149.636.000,00	149.636.000,00
	2.12 Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar Penanaman Modal	0,00	0,00	1.572.350.000,00	1.572.350.000,00
	4.01 Urusan Penunjang / Pemerintahan Administrasi Pemerintahan	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00
	4.02 Urusan Penunjang / Pemerintahan Pengawasan	11.150.380.293,00	11.669.440.747,00	15.899.732.225,00	27.569.172.972,00
	4.03 Urusan Penunjang / Pemerintahan Perencanaan	0,00	0,00	81.383.000,00	81.383.000,00
	4.04 Urusan Penunjang / Pemerintahan Keuangan	0,00	0,00	657.000.000,00	657.000.000,00
	4.05 Urusan Penunjang / Pemerintahan Kepegawaian	0,00	0,00	190.000.000,00	190.000.000,00
4.01.04	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	0,00	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00
	4.01 Urusan Penunjang / Pemerintahan Administrasi Pemerintahan	0,00	3.333.018.363,00	25.832.583.787,00	29.165.602.150,00
4.01.11	<b>KECAMATAN BATANG</b>	0,00	3.333.018.363,00	25.832.583.787,00	29.165.602.150,00
	1.03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	8.251.259.990,00	12.275.955.778,00	20.527.215.768,00
	1.04 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	1.653.902.285,00	1.653.902.285,00
	2.05 Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	0,00	0,00	5.252.871.315,00	5.252.871.315,00
	2.07 Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	32.846.700,00	32.846.700,00
	4.01 Urusan Penunjang / Pemerintahan Administrasi Pemerintahan	0,00	0,00	3.645.856.500,00	3.645.856.500,00
4.01.12	<b>KECAMATAN TULIS</b>	0,00	8.251.259.990,00	1.690.478.978,00	9.941.738.968,00
		0,00	1.777.472.940,00	318.750.000,00	2.096.222.940,00





KODE	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		PENDAPATAN	BELANJA		
				TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2		3	4	5	6
4.01.13	4.01	Urusan Penunjang / Pemerintahan Administrasi Pemerintahan <b>KECAMATAN WARUNGASEM</b>	0,00	1.777.472.940,00	318.750.000,00	2.096.222.940,00
			0,00	1.447.356.903,00	522.500.000,00	1.969.856.903,00
4.01.14	4.01	Urusan Penunjang / Pemerintahan Administrasi Pemerintahan <b>KECAMATAN WONOTUNGGAL</b>	0,00	1.447.356.903,00	522.500.000,00	1.969.856.903,00
			0,00	1.509.133.468,00	341.250.000,00	1.850.383.468,00
4.01.15	4.01	Urusan Penunjang / Pemerintahan Administrasi Pemerintahan <b>KECAMATAN BANDAR</b>	0,00	1.509.133.468,00	341.250.000,00	1.850.383.468,00
			0,00	1.906.357.684,00	1.074.973.960,00	2.981.331.644,00
4.01.16	4.01	Urusan Penunjang / Pemerintahan Administrasi Pemerintahan <b>KECAMATAN BLADO</b>	0,00	1.906.357.684,00	1.074.973.960,00	2.981.331.644,00
			0,00	1.695.082.986,00	341.250.000,00	2.036.332.986,00
4.01.17	4.01	Urusan Penunjang / Pemerintahan Administrasi Pemerintahan <b>KECAMATAN REBAN</b>	0,00	1.695.082.986,00	341.250.000,00	2.036.332.986,00
			0,00	1.612.472.641,00	363.750.000,00	1.976.222.641,00
4.01.18	4.01	Urusan Penunjang / Pemerintahan Administrasi Pemerintahan <b>KECAMATAN KANDEMAN</b>	0,00	1.612.472.641,00	363.750.000,00	1.976.222.641,00
			0,00	1.603.252.583,00	303.679.100,00	1.906.931.683,00
4.01.19	4.01	Urusan Penunjang / Pemerintahan Administrasi Pemerintahan <b>KECAMATAN TERSONO</b>	0,00	1.603.252.583,00	303.679.100,00	1.906.931.683,00
			0,00	1.580.385.692,00	753.250.000,00	2.333.635.692,00
	2.07	Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
	4.01	Urusan Penunjang / Pemerintahan Administrasi Pemerintahan	0,00	1.580.385.692,00	703.250.000,00	2.283.635.692,00
	4.03	Urusan Penunjang / Pemerintahan Perencanaan	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
4.01.20		<b>KECAMATAN GRINGSING</b>	0,00	1.525.735.981,00	348.748.030,00	1.874.484.011,00
	4.01	Urusan Penunjang / Pemerintahan Administrasi Pemerintahan	0,00	1.525.735.981,00	348.748.030,00	1.874.484.011,00
4.01.21		<b>KECAMATAN SUBAH</b>	0,00	1.553.955.758,00	849.438.000,00	2.403.393.758,00
	4.01	Urusan Penunjang / Pemerintahan Administrasi Pemerintahan	0,00	1.553.955.758,00	849.438.000,00	2.403.393.758,00
4.01.22		<b>KECAMATAN LIMPUNG</b>	0,00	1.445.153.046,00	337.253.900,00	1.782.406.946,00
	4.01	Urusan Penunjang / Pemerintahan Administrasi Pemerintahan	0,00	1.445.153.046,00	337.253.900,00	1.782.406.946,00
4.01.23		<b>KECAMATAN BANYUPUTIH</b>	0,00	1.446.237.223,00	315.000.000,00	1.761.237.223,00
	4.01	Urusan Penunjang / Pemerintahan Administrasi Pemerintahan	0,00	1.446.237.223,00	315.000.000,00	1.761.237.223,00
4.01.24		<b>KECAMATAN PECALUNGAN</b>	0,00	1.409.356.718,00	311.100.000,00	1.720.456.718,00
	4.01	Urusan Penunjang / Pemerintahan Administrasi Pemerintahan	0,00	1.409.356.718,00	311.100.000,00	1.720.456.718,00
4.01.25		<b>KECAMATAN BAWANG</b>	0,00	1.620.287.578,00	367.286.624,00	1.987.574.202,00
	4.01	Urusan Penunjang / Pemerintahan Administrasi Pemerintahan	0,00	1.620.287.578,00	367.286.624,00	1.987.574.202,00



KODE	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
4.02.01	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>	0,00	5.296.399.650,00	4.573.312.496,00	9.869.712.146,00
4.02	Urusan Penunjang / Pemerintahan Pengawasan	0,00	5.296.399.650,00	4.573.312.496,00	9.869.712.146,00
4.03.01	<b>BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	0,00	3.590.452.451,00	4.332.176.500,00	7.922.628.951,00
4.03	Urusan Penunjang / Pemerintahan Perencanaan	0,00	3.590.452.451,00	3.812.176.500,00	7.402.628.951,00
4.07	Urusan Penunjang / Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00	520.000.000,00	520.000.000,00
4.04.01	<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH</b>	91.076.100.000,00	41.754.356.305,00	35.102.392.191,00	76.856.748.496,00
4.04	Urusan Penunjang / Pemerintahan Keuangan	91.076.100.000,00	41.754.356.305,00	35.102.392.191,00	76.856.748.496,00
4.04.02	<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH (PPKD)</b>	1.594.219.263.000,00	424.550.410.146,00	0,00	424.550.410.146,00
4.04	Urusan Penunjang / Pemerintahan Keuangan	1.594.219.263.000,00	424.550.410.146,00	0,00	424.550.410.146,00
4.05.01	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	0,00	3.555.955.885,00	7.610.692.850,00	11.166.648.735,00
4.05	Urusan Penunjang / Pemerintahan Kepegawaian	0,00	3.555.955.885,00	7.610.692.850,00	11.166.648.735,00
<b>JUMLAH</b>		1.840.617.425.977,00	1.163.336.380.647,00	727.281.045.330,00	1.890.617.425.977,00
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		(50.000.000.000,00)			



KODE	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PEMBIAYAAN			SILPA TAB
		PENERIMAAN	PENGELUARAN	PEMBIAYAAN NETTO	
1	2	3	4	5	6
1.02.01	<b>DINAS KESEHATAN</b>	12.841.384.337,00	0,00	12.841.384.337,00	
1.02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	12.841.384.337,00	0,00	12.841.384.337,00	
1.02.02	<b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG</b>	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00	
1.02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00	
4.01.03	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	0,00	5.000.000.000,00	(5.000.000.000,00)	
4.01	Urusan Penunjang / Pemerintahan Administrasi Pemerintahan	0,00	5.000.000.000,00	(5.000.000.000,00)	
4.04.02	<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH (PPKD)</b>	42.158.615.663,00	0,00	42.158.615.663,00	
4.04	Urusan Penunjang / Pemerintahan Keuangan	42.158.615.663,00	0,00	42.158.615.663,00	

**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN**

0,00

BATANG, 27 Desember 2019

**BUPATI BATANG,**

ttd

**WIHAJI**







**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,**  
**PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
 TAHUN ANGGARAN 2020

**Urusan Pemerintahan** : 4 . 05      Urusan Penunjang / Pemerintahan Kepegawaian  
**Organisasi** : 4 . 05 . 01      BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	11.166.648.735,00	PP Nomor 70 Tahun 2015
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.555.955.885,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.555.955.885,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	7.610.692.850,00	
4.05 . 4.05.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1.167.573.300,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	2.113.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.113.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	183.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	183.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 03	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	25.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 04	<i>Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS</i>	29.999.800,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.250.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.749.800,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 06	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional</i>	55.700.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.700.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 08	<i>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</i>	48.528.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.128.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 10	<i>Penyediaan Alat Tulis Kantor</i>	24.595.700,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.595.700,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 11	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	29.750.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.750.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 12	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	160.830.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.830.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	125.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 13	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	295.090.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	295.090.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	9.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.660.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.340.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 17	<i>Penyediaan Makanan dan Minuman</i>	87.460.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	87.460.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 18	<i>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah</i>	168.656.800,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	168.656.800,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 23	<i>Pengelolaan Keuangan SKPD</i>	47.850.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	47.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	321.100.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 03	<i>Pembangunan Gedung Kantor</i>	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 22	<i>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor</i>	217.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	217.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional</i>	104.100.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	104.100.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	120.430.700,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 07	<i>Pembinaan Disiplin Pegawai</i>	120.430.700,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	118.630.700,00	
4.05 . 4.05.01 . 04	<b>Program Fasilitas Pindah/ Purna Tugas PNS</b>	24.999.800,00	
4.05 . 4.05.01 . 04 . 04	<i>Pelatihan/Workshop Persiapan Purna Tugas</i>	24.999.800,00	
4.05 . 4.05.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.450.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.549.800,00	
4.05 . 4.05.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	2.214.172.050,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 02	<i>Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan</i>	31.488.650,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	550.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.938.650,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 03	<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan</i>	43.520.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.050.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.470.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 10	<i>Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNSD</i>	1.674.254.400,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.671.254.400,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 16	<i>Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNSD</i>	41.250.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.250.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 17	<i>Diklat Teknis bagi PNSD</i>	59.780.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.780.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 29	<i>Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNSD</i>	363.879.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	363.879.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	5.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 01	<i>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	5.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07	<b>Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah</b>	74.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 01	<i>Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah</i>	74.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	3.599.780.400,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 01	<i>Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS</i>	634.794.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	170.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	463.994.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 02	<i>Seleksi Penerimaan Calon PNS</i>	2.496.540.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	371.875.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.124.665.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 03	<i>Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah</i>	296.267.900,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	185.042.900,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	109.125.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 05	<i>Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi</i>	18.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 06	<i>Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS</i>	64.178.500,00	





KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.378.500,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 12	<i>Pengembangan Aparatur</i>	40.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 14	<i>Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS</i>	50.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.100.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.900.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29	<b>Program Pendidikan Kedinasan</b>	83.636.600,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 01	<i>Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme</i>	83.636.600,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	79.136.600,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(11.166.648.735,00)	

BATANG, 27 Desember 2019

**BUPATI BATANG,**

ttd

**WIHAJI**





**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN**  
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>	52.858.259.370,00	283.551.550.778,00	174.963.961.724,00	511.373.771.872,00
1.01	<b>Pendidikan</b>	2.437.892.200,00	126.282.011.216,00	23.602.189.040,00	152.322.092.456,00
1.01 . 1.01.01	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>	2.437.892.200,00	126.282.011.216,00	23.602.189.040,00	152.322.092.456,00
1.01 . 1.01.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1.630.400.000,00	1.654.021.000,00	0,00	3.284.421.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	33.355.000,00	0,00	33.355.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	389.800.000,00	0,00	389.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	0,00	273.200.000,00	0,00	273.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	25.500.000,00	374.536.000,00	0,00	400.036.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	0,00	34.640.000,00	0,00	34.640.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	29.040.000,00	0,00	29.040.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	0,00	156.500.000,00	0,00	156.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam dan Ke Luar Daerah	0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23	Pengelolaan Keuangan SKPD	1.604.900.000,00	42.950.000,00	0,00	1.647.850.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	200.000,00	237.814.128,00	0,00	238.014.128,00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 11	Kegiatan Pembinaan Kesamaptaan	200.000,00	237.814.128,00	0,00	238.014.128,00
1.01 . 1.01.01 . 06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	169.206.700,00	35.793.300,00	0,00	205.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48.608.600,00	1.391.400,00	0,00	50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 02	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	29.815.000,00	185.000,00	0,00	30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 04	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	14.783.100,00	216.900,00	0,00	15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05	Kegiatan Penyusunan Laporan Evaluasi Anggaran	76.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 09	Kegiatan Penyusunan LAKIP Kabupaten	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>	32.980.000,00	2.443.680.000,00	888.000.000,00	3.364.660.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01	Pembangunan Gedung Sekolah	0,00	0,00	195.000.000,00	195.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 09	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	0,00	0,00	275.000.000,00	275.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD Non Formal	750.000,00	199.250.000,00	0,00	200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	0,00	1.761.660.000,00	418.000.000,00	2.179.660.000,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
4.07 . 4.03.01 . 55 . 01	Fasilitas Krenova	11.000.000,00	88.350.000,00	0,00	99.350.000,00
4.07 . 4.03.01 . 55 . 02	Penguatan Sistem Inovasi Daerah	9.200.000,00	76.450.000,00	0,00	85.650.000,00
<b>JUMLAH</b>		83.314.928.520,00	434.123.309.086,00	209.842.807.724,00	727.281.045.330,00

BATANG, 27 Desember 2019

**BUPATI BATANG,**

ttd

**WIHAJI**





**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN**  
**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA**  
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE	URAIAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG			JUMLAH
		PEGAWAI	NON PEGAWAI	PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7
01	<b>PELAYANAN UMUM</b>	140.214.464.352,00	424.550.410.146,00	21.721.281.950,00	85.650.945.141,00	16.483.870.760,00	688.620.972.349,00
01 2 03	Pangan	9.452.289.072,00	0,00	101.950.000,00	1.943.300.000,00	2.942.461.000,00	14.440.000.072,00
01 2 05	Lingkungan Hidup	5.222.800.641,00	0,00	823.583.500,00	6.378.827.839,00	709.346.700,00	13.134.558.680,00
01 2 10	Komunikasi dan Informatika	3.055.603.457,00	0,00	102.550.000,00	5.470.197.171,00	2.093.800.000,00	10.722.150.628,00
01 2 14	Statistik	0,00	0,00	48.000.000,00	152.400.000,00	0,00	200.400.000,00
01 2 18	Kearsipan	0,00	0,00	18.500.000,00	356.405.600,00	86.794.400,00	461.700.000,00
01 4 01	Administrasi Pemerintahan	68.286.606.891,00	0,00	3.108.199.500,00	41.651.716.944,00	5.161.108.160,00	118.207.631.495,00
01 4 02	Pengawasan	5.296.399.650,00	0,00	873.020.000,00	3.450.675.496,00	331.000.000,00	9.951.095.146,00
01 4 03	Perencanaan	3.590.452.451,00	0,00	559.200.000,00	3.462.628.500,00	467.348.000,00	8.079.628.951,00
01 4 04	Keuangan	41.754.356.305,00	424.550.410.146,00	15.225.353.950,00	15.909.580.741,00	4.157.457.500,00	501.597.158.642,00
01 4 05	Kepegawaian	3.555.955.885,00	0,00	774.475.000,00	6.441.662.850,00	534.555.000,00	11.306.648.735,00
01 4 07	Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00	86.450.000,00	433.550.000,00	0,00	520.000.000,00
03	<b>KETERTIBAN DAN KEAMANAN</b>	7.836.951.627,00	0,00	2.692.457.500,00	2.789.730.706,00	340.633.800,00	13.659.773.633,00
03 1 05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	7.836.951.627,00	0,00	2.692.457.500,00	2.789.730.706,00	340.633.800,00	13.659.773.633,00
04	<b>EKONOMI</b>	22.959.556.800,00	0,00	4.108.042.500,00	45.636.060.497,00	9.904.991.900,00	82.608.651.697,00
04 2 07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.933.054.721,00	0,00	1.848.322.500,00	3.963.172.300,00	200.000.000,00	8.944.549.521,00
04 2 09	Perhubungan	4.555.866.976,00	0,00	315.275.000,00	23.756.546.290,00	1.376.253.300,00	30.003.941.566,00
04 2 11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	0,00	0,00	103.000.000,00	437.000.000,00	0,00	540.000.000,00
04 2 12	Penanaman Modal	2.739.411.953,00	0,00	218.550.000,00	2.144.436.634,00	1.891.000.000,00	6.993.398.587,00
04 3 01	Kelautan dan Perikanan	4.766.839.271,00	0,00	309.375.000,00	3.579.695.000,00	261.712.000,00	8.917.621.271,00
04 3 03	Pertanian	0,00	0,00	836.670.000,00	7.205.553.750,00	29.976.600,00	8.072.200.350,00
04 3 04	Kehutanan	0,00	0,00	45.600.000,00	29.400.000,00	0,00	75.000.000,00
04 3 06	Perdagangan	7.964.383.879,00	0,00	147.900.000,00	2.699.831.800,00	5.611.500.000,00	16.423.615.679,00
04 3 07	Perindustrian	0,00	0,00	283.350.000,00	1.750.424.723,00	534.550.000,00	2.568.324.723,00
04 3 08	Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
05	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>	0,00	0,00	37.700.000,00	111.936.000,00	0,00	149.636.000,00
05 2 04	Pertanahan	0,00	0,00	37.700.000,00	111.936.000,00	0,00	149.636.000,00





KODE	URAIAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG			JUMLAH
		PEGAWAI	NON PEGAWAI	PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7
06	<b>PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM</b>	14.227.123.655,00	0,00	3.637.790.670,00	18.506.289.344,00	97.072.408.403,00	133.443.612.072,00
06 1 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.547.015.216,00	0,00	2.358.898.370,00	11.303.597.244,00	81.976.604.888,00	107.186.115.718,00
06 1 04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.680.108.439,00	0,00	1.278.892.300,00	7.202.692.100,00	15.095.803.515,00	26.257.496.354,00
07	<b>KESEHATAN</b>	98.145.619.653,00	0,00	44.988.190.200,00	134.599.538.537,00	55.075.872.921,00	332.809.221.311,00
07 1 02	Kesehatan	98.145.619.653,00	0,00	42.951.430.200,00	130.598.854.665,00	53.833.730.481,00	325.529.634.999,00
07 2 08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	2.036.760.000,00	4.000.683.872,00	1.242.142.440,00	7.279.586.312,00
08	<b>PARIWISATA DAN BUDAYA</b>	3.419.136.395,00	0,00	681.410.500,00	5.811.766.770,00	3.390.975.000,00	13.303.288.665,00
08 2 16	Kebudayaan	0,00	0,00	458.900.000,00	1.906.550.000,00	45.000.000,00	2.410.450.000,00
08 3 02	Pariwisata	3.419.136.395,00	0,00	222.510.500,00	3.905.216.770,00	3.345.975.000,00	10.892.838.665,00
10	<b>PENDIDIKAN</b>	440.993.539.980,00	0,00	3.188.461.400,00	129.122.056.358,00	27.397.054.940,00	600.701.112.678,00
10 1 01	Pendidikan	437.904.712.961,00	0,00	2.437.892.200,00	126.282.011.216,00	23.602.189.040,00	590.226.805.417,00
10 2 13	Kepemudaan dan Olah Raga	0,00	0,00	586.800.000,00	1.450.618.000,00	1.423.332.000,00	3.460.750.000,00
10 2 17	Perpustakaan	3.088.827.019,00	0,00	163.769.200,00	1.389.427.142,00	2.371.533.900,00	7.013.557.261,00
11	<b>PERLINDUNGAN SOSIAL</b>	10.989.578.039,00	0,00	2.259.593.800,00	11.894.985.733,00	177.000.000,00	25.321.157.572,00
11 1 06	Sosial	2.294.640.473,00	0,00	1.138.688.800,00	5.374.664.847,00	115.000.000,00	8.922.994.120,00
11 2 01	Tenaga Kerja	2.057.183.555,00	0,00	336.770.000,00	2.245.349.012,00	62.000.000,00	4.701.302.567,00
11 2 02	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	3.095.872.216,00	0,00	174.489.000,00	1.166.353.100,00	0,00	4.436.714.316,00
11 2 06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.541.881.795,00	0,00	609.646.000,00	3.108.618.774,00	0,00	7.260.146.569,00
		738.785.970.501,00	424.550.410.146,00	83.314.928.520,00	434.123.309.086,00	209.842.807.724,00	1.890.617.425.977,00

BATANG, 27 Desember 2019  
**BUPATI BATANG,**

ttd

**WIHAJI**





LAMPIRAN VI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NO 14 TAHUN 2019  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2020

**DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PERGOLONGAN DAN PERJABATAN  
TAHUN ANGGARAN 2020**

GOLONGAN	ESELON					TOTAL
	I	II	III	IV	STAF	
Golongan IV/e	-	-	-	-	-	0
Golongan IV/d	-	1	0	0	1	2
Golongan IV/c	-	27	1	0	9	37
Golongan IV/b	-	1	44	0	128	173
Golongan IV/a	-	0	82	52	1884	2018
<b>JUMLAH GOLONGAN IV</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>127</b>	<b>52</b>	<b>2022</b>	<b>2230</b>
Golongan III/d	-	0	9	236	393	638
Golongan III/c	-	0	0	126	481	607
Golongan III/b	-	0	0	23	833	856
Golongan III/a	-	0	0	5	893	898
<b>JUMLAH GOLONGAN III</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>390</b>	<b>2600</b>	<b>2999</b>
Golongan II/d	-	0	0	0	146	146
Golongan II/c	-	0	0	0	702	702
Golongan II/b	-	0	0	0	209	209
Golongan II/a	-	0	0	0	156	156
<b>JUMLAH GOLONGAN II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1213</b>	<b>1213</b>
Golongan I/d	-	0	0	0	23	23
Golongan I/c	-	0	0	0	106	106
Golongan I/b	-	0	0	0	5	5
Golongan I/a	-	0	0	0	2	2
<b>JUMLAH GOLONGAN I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136</b>	<b>136</b>
<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>136</b>	<b>442</b>	<b>5971</b>	<b>6578</b>

Batang, 27 Desember 2019

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
 NO 14 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2020

**KABUPATEN BATANG**  
**DAFTAR PIUTANG DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

NO.	URAIAN RINCIAN PIUTANG	TAHUN PENGAKUAN PIUTANG	JMH PIUTANG S.D. 2019	PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN 2020	PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN 2020	PERKIRAAN SALDO AKHIR TAHUN 2020
				Rp -	Rp -	Rp -
				Rp -	Rp -	Rp -
				Rp -	Rp -	Rp -
				Rp -	Rp -	Rp -
	JUMLAH .....	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

Batang, 27 Desember 2019

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI



LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
 NO 14 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2020

**KABUPATEN BATANG**  
**DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA PERUSAHAAN/ LEMBAGA	DASAR HUKUM PENYERTAAN MODAL (INVESTASI DAERAH)	BENTUK PENYERTAAN MODAL (INVESTASI DAERAH)	JUMLAH PENYERTAAN MODAL (INVESTASI DAERAH)	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN ANGGARAN LALU	PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN	HASIL PENYERTAAN MODAL (INVESTASI DAERAH TAHUN INI)	JUMLAH MODAL (INVESTASI YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI)	JUMLAH SISA MODAL (INVESTASI YANG DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI)
1		PERUSDA ANEKA USAHA	PERDA	Penyertaan Modal	3.816.050.276,00	3.816.050.276,00		3.816.050.276,00	-	-	-	-
2		PDAM	PERDA	Penyertaan Modal	312.671.114.555,00	28.041.089.555,00		28.041.089.555,00	-	-	-	-
3		PD. BKK BATANG	PERDA	Penyertaan Modal	6.680.000.000,00	7.680.000.000,00		7.680.000.000,00	-	-	-	-
4		PT. BANK JATENG	PERDA	Penyertaan Saham	43.975.000.000,00	31.334.000.000,00	5.000.000.000,00	36.334.000.000,00	-	-	-	-
5		PT. BPR BAPERA	PERDA	Penyertaan Modal	5.990.000.000,00	7.990.000.000,00		7.990.000.000,00	-	-	-	-
		PD. BKK BANDAR	PERDA	Penyertaan Modal	3.350.000.000,00	3.750.000.000,00		3.750.000.000,00	-	-	-	-
6		PT PRPP	PERDA	Penyertaan Saham	464.200.000,00	464.200.000,00	-	464.200.000,00	-	-	-	-
7		KOPERASI BATANG CEMERLANG	PERDA	Penyertaan Modal	470.000.000,00	470.000.000,00	-	470.000.000,00	-	-	-	-
		<b>JUMLAH</b>			<b>Rp 377.416.364.831,00</b>	<b>Rp 83.545.339.831,00</b>	<b>Rp 5.000.000.000</b>	<b>Rp 88.545.339.831</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>

Batang, 27 Desember 2019

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI





**KABUPATEN BATANG**  
**DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASSET TETAP DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

NO.	JENIS ASSET TETAP DAERAH	SALDO PADA AKHIR TAHUN 2019	PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN 2020	PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN 2020	SALDO AKHIR TGL 31 DESEMBER 2020
	Tanah	699.182.730.382,00	1.900.000.000,00	-	701.082.730.382,00
	Peralatan dan Mesin	470.010.625.072,60	42.677.245.433,00	-	512.687.870.505,60
	Bangunan dan Gedung	971.787.289.807,94	83.187.545.138,00	-	1.054.974.834.945,94
	Jalan, Irigasi dan Jembatan	1.058.947.144.249,60	79.171.020.553,00	-	1.138.118.164.802,60
	Asset Tetap Lainnya	64.723.302.472,63	2.406.996.600,00	-	67.130.299.072,63
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.264.651.091.984,77</b>	<b>209.342.807.724,00</b>	<b>-</b>	<b>3.473.993.899.708,77</b>

Batang, 27 Desember 2019  
 BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI



LAMPIRAN X  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NO 14 TAHUN 2019  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2020

**KABUPATEN BATANG**  
**DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASSET LAIN-LAIN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

NO.	JENIS ASET LAINNYA	SALDO PADA AKHIR TAHUN 2019	PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN 2020	PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN 2020	SALDO AKHIR TGL 31 DESEMBER 2020
	Aset lainnya	Rp 188.344.187.095	Rp 500.000.000	Rp -	Rp 188.844.187.095
	JUMLAH .....	Rp 188.344.187.095	Rp 500.000.000	Rp -	Rp 188.844.187.095

Batang, 27 Desember 2019

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI



LAMPIRAN XI  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
 NO 14 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN  
 DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI  
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO	SKPD	NAMA KEGIATAN	JUMLAH TAHUN AWAL PENGANGGARAN	JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2018		JUMLAH REALISASI S/D AKHIR TAHUN 2019	JUMLAH SISA ANGGARAN YANG DIANGGARKAN TAHUN INI	
				APBD 2019	APBD P 2019		APBD 2020	APBD P 2020
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>			-	-	-	-	-	-

Batang, 27 Desember 2019

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI



LAMPIRAN XII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
 NO 14 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2020

KABUPATEN BATANG  
 DAFTAR PINJAMAN DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	SUMBER PINJAMAN DAERAH	DASAR HUKUM PINJAMAN/OBLIGASI	TGL/THN PERJANJIAN PINJAMAN/OBLIGASI	JML PINJAMAN/NILAI NOMINAL OBLIGASI	JANGKA WAKTU PINJAMAN	PERSENTASE BUNGAN PINJAMAN (%)	TUJUAN PENGGUNAAN PINJAMAN	JUMLAH PEMBAYARAN TAHUN INI		JUMLAH SISA PEMBAYARAN (Rp)	
								POKOK PINJAMAN DAERAH	BUNGA & JASA BANK	POKOK PINJAMAN DAERAH	BUNGA
1	BANK	-	-	30.000.000.000	1 TAHUN	8,5%/THN	Biaya Operasional RSUD	-	-	-	-
		JUMLAH									

Batang, 27 Desember 2019  
 BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI





LAMPIRAN XIII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NO 14 TAHUN 2019  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2020

**KABUPATEN BATANG**  
**DAFTAR DANA CADANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

NO.	TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN	SALDO AWAL	TRANSFER DARI KAS DAERAH	TRANSFER KE KAS DAERAH	SALDO AKHIR	SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN
-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

Batang, 27 Desember 2019

BUPATI BATANG

ttd

WIHAJI